

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan Indonesia dan China memiliki akar sejarah yang panjang. Interaksi antara nenek moyang bangsa China dengan nenek moyang bangsa Indonesia telah dimulai sejak 2000 tahun lalu¹. Hubungan erat ini menemukan momentum simboliknya dalam kisah perjalanan muhibah Cheng Ho yang sangat sangat masyhur pada abad ke 14². Salah satu bukti budaya yang menunjukkan interaksi tersebut adalah bedug yang digunakan oleh masjid-masjid di Indonesia. Bedug tersebut merupakan bawaan dari China. Di era modern, hubungan kedua negara dimulai pada tahun 1950 yang merupakan tahun kedua setelah RRC didirikan oleh Partai Komunis China (PKC) pada tahun 1949. Indonesia tercatat sebagai negara pertama yang mengakui berdirinya China baru di bawah pemerintahan komunis. Selanjutnya di era Soekarno, hubungan kedua negara pernah sangat erat yang ditandai dengan terbentuknya Poros Jakarta-Peking yang menjadi simbol kedekatan Indonesia dengan komunisme kala itu. Tipe hubungan keduanya selalu dinamis sesuai dengan konteks sejarah pada masa itu. Begitu pula sejak berdirinya Republik Indonesia dan Republik Rakyat China.

¹ <http://politik.kompasiana.com/2010/10/02/hubungan-indonesia-china-mau-dibawa-kemana/diakses,12november2010>.

² <http://prayudi.wordpress.com/2009/01/03/perjalanan-haji-laksamana-chengho/diakses/20november2010>

Hubungan kedua negara mulai terbentuk baik sejak Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955³. Kedua Negara bekerjasama dalam hubungan sosial politik. Hubungan Indonesia-China mengalami pasang surut karena kedua negara mempunyai asas kewarganegaraan yang berbeda. Pada masa Presiden Soekarno, konflik etnis Tionghoa semakin berlanjut namun tidak mengurangi hubungan Indonesia-China. Hal ini dijalankan pemerintahan Indonesia untuk mendapatkan posisi politik yang signifikan di mata Internasional⁴. Politik luar negeri yang dijalankan Presiden Soekarno pada waktu itu justru membuat hubungan kedua negara semakin erat. Politik luar negeri Indonesia pada masa orde lama dijalankan untuk mendapatkan posisi politik yang signifikan di lingkungan internasional, sehingga ketika RRC dan PKI mengobarkan perjuangan “membela rakyat yang tertindas” Presiden Soekarno sangat mendukung hal tersebut dan dalam rangka Politik Anti Imperialisme dan Kolonialismenya.

Peran Soekarno sangat dominan dalam politik luar negeri Indonesia karena peran tunggalnya sebagai pengambil keputusan. Sejarah mencatat bahwa salah satu kebijakan politik luar negeri yang dijalankan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama ini yakni Politik Konfrontasi. Politik Konfrontasi ala Soekarno ini telah melanggar landasan operasional dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif yang pernah ditekankan Muhammad

³ W.D. Sukisman, *sejarah Cina Kontemporer*, Dari Nur Ha Ci sampai Deng Xiao Ping, Hal 85

⁴ Soesiswo Soenarko, SH, MA Evaluasi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia

Hatta dalam pidatonya “*Mendayung antara dua karang*”⁵. Namun kedekatan ini segera berakhir setelah terjadinya “ Peristiwa 30 September 1965 “, yaitu suatu usaha perebutan kekuasaan yang gagal terhadap pemerintahan Indonesia yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. RRC dianggap memiliki peran besar dalam membantu rencana PKI, hal ini dibuktikan dengan berbagai sikap RRC yang kontra terhadap pemerintahan Indonesia.

Setelah Indonesia berada dalam kekuasaan militer yaitu dimulainya pemerintahan Orde Baru dibawah Jenderal Soeharto melalui sebuah memorandum dari Departemen Luar Negeri yang dikirim ke Beijing, dengan resmi ditegaskan bahwa pemerintahan Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat China (RRC) terhitung mulai tanggal 30 Oktober 1967. Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat⁶. Dengan mengenyampingkan sejarah Orde Baru dan setelah melalui waktu yang panjang, tawar-menawar dan syarat-syarat kedua negara maka pemulihan diplomatik baru dilakukan pada tanggal 8 Agustus 1990 setelah pembekuan hubungan selama 23 tahun. Keberhasilan hubungan diplomatik ini sangat

⁵ <http://www.neonnub.co.cc/2011/02/soekarno-dan-politik-luar-negeri.html>

⁶ <http://www.indonesiaindonesia.com/f/2390-indonesia-era-orde-baru,diakses/18mei2011>

didorong oleh faktor ekonomi perdagangan. Dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1988 tersurat bahwa dalam rangka mengembangkan ekspor non migas maka perlu dicarikan peluang pasar baru untuk menyerap ekspor komoditas non migas Indonesia.

Dalam hal ini maka salah satu alternatif dalam pencarian pasar tersebut adalah RRC. Wilayah RRC yang luas dan jumlah penduduk yang sangat banyak merupakan pasar yang cukup potensial untuk memasarkan hasil non migas dari Indonesia, meskipun daya kemampuan daya beli mereka rendah⁷. Namun banyak kalangan menilai bahwa tidak ada bedanya antara saat sebelum dan setelah pemulihan hubungan diplomatik. Pemulihan hubungan diplomatik tidak diikuti oleh aksi yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan hubungan kerjasama kedua negara ditambah oleh berbagai kendala teknis yang belum dapat diatasi seperti ketidakmampuan teknologi, kekurangan informasi dan lain sebagainya sehingga masih belum bisa memberikan signifikansi yang cukup terhadap hubungan RI-RRC yang mulai di bangun kembali sejak 1990.

Berbagai situasi dan kondisi yang berbeda pada tiap-tiap masa menjadi indikator tingkat kualitas hubungan bilateral RI-RRC. Seperti halnya pada masa awal-awal reformasi, berbagai indikasi politik, ekonomi, sosial dan budaya menunjukkan adanya peningkatan hubungan RI-RRC. Pemerintahan Reformasi dimulai pada tahun 1998 setelah mundurnya Presiden Soeharto.

⁷ http://openlibrary.org/books/OL1839227M/Jawaban_rancangan_GBHN_tahun_1988-1993/diakses/12november2010.

Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organisasi aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya⁸. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir diseluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Setelah pengunduran diri Soeharto maka Habibie yang pada saat itu menjadi Wakil Presiden yang kemudian menggantikan Soeharto. Dapat dikatakan bahwa pemerintahan Presiden Habibie sebagai pemerintahan yang baru di era reformasi. Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi. Kejadian penting pada masa pemerintahan Habibie adalah keputusannya untuk mengizinkan Timor-Timur untuk mengadakan referendum yang berakhir dengan berpisahnya wilayah tersebut dari Indonesia pada Oktober 1999.

Keputusan tersebut terbukti tidak populer di mata masyarakat yang hingga kini pun masa pemerintahan Habibie sering dianggap sebagai salah

⁸ Ibid hal 3.

satu masa kelam dalam sejarah Indonesia⁹. Namun visi baru tentang reformasi telah mulai mewarnai kebijaksanaan pemerintahan Indonesia, termasuk hubungan bilateral RI-RRC. Sebuah MoU (*Memorandum of Understanding*) antara China National Native Produce and Animal by Products Import and Export Corporation (TUHSU) dan The Indonesian Chamber of Commerce Industry China Committee (KIKC) mengenai rencana perdagangan imbal-balik yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 november 1998, menjadi kerangka kerjasama kedua Negara selanjutnya¹⁰.

Setelah KH Abdurahman Wachid terpilih kemudian dilantik menjadi Presiden Indonesia untuk masa pemerintahan 1999-2004 menggantikan Presiden Habibie, indikasi peningkatan hubungan RI-RRC semakin tampak. KH. Abdurachman Wachid atau lebih akrabnya Gus Dur mengadakan kunjungan resmi kenegaraan yang pertama kalinya ke RRC pada tanggal 1-3 desember 1999, setelah mengadakan beberapa lawatan ke-13 negara lain. Presiden RRC Jiang Zemin menyatakan bahwa hal itu menunjukkan bagaimana pentingnya Indonesia menjalin hubungan yang baik dengan RRC. Gus Dur yang dikenal selalu kontroversial juga membuat pernyataan bahwa dirinya adalah keturunan Tiong Hoaa. Dari kunjungan itu, hubungan bilateral kedua negara tersebut hubungan ditegaskan kembali dalam komunike bersama RI-RRC¹¹. Untuk merealisasikan komunike tersebut pada bulan Mei tahun 2000 Menteri Luar Negeri RI Alwi Shihab juga mengadakan

⁹ Ibid hal 3.

¹⁰ Dokumen deplu RI yang dipublikasikan melalui www.deplu.co.id

¹¹ Kompas, 4 desember 1999.

kunjungan ke RRC, dan kunjungan tersebut dibalas oleh RRC melalui kunjungan Wakil Presiden Hu Jintao pada bulan Juli 2000 dan kunjungan Perdana Menteri Zhu Riangji pada bulan November 2001.

Selanjutnya pada bulan Juli 2001 Megawati diangkat menjadi Presiden RI menggantikan Gus Dur. Sedangkan komitmen meningkatkan hubungan kedua negara tetap terjaga. Pada tanggal 24-27 Agustus tahun 2002 presiden Megawati mengadakan kunjungan resmi ke RRC, setelah itu dilanjutkan ke Korea Selatan, Korea Utara dan kemudian ke India. Dari kunjungan tersebut banyak menghasilkan perjanjian kerjasama antara negara-negara yang di kunjungi. Sebanyak 21 *Memorandum of Understanding* (MoU) telah ditandatangani antara kedua belah pihak baik dari masing-masing pemerintahan maupun pengusaha-pengusaha setiap negara pada bulan Maret 2002. Pemerintahan RRC juga memberikan pinjaman lunak dengan bunga 3% pertahun dalam jangka waktu 20 tahun dengan uang senilai 400 juta U\$ dollar dan hibah senilai 6juta U\$ dollar. Namun tentu saja angka bukan segalanya, aspek kualitatif juga penting untuk diperhatikan. Hubungan ekonomi kedua negara tidak bisa semata-mata dilihat dari meningkatnya volume perdagangan. Maka dari itu ada tiga prinsip yang disepakati keduanya agar hubungan ekonomi yang terjalin tidak semata-mata bagus dari segi kuantitas, tetapi juga tinggi dari segi kualitas. Tiga prinsip tersebut adalah saling berimbang, saling berkelanjutan, dan saling menguntungkan.

Bila dilihat antara tahun 1999 - 2000, neraca perdagangan RI - RRC terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam hal perdagangan. Dalam ekonomi, surplus atau defisit neraca perdagangan bilateral bukan merupakan masalah yang signifikan. Perdagangan yang seimbang justru yang seharusnya dicapai. Surplus atau defisit dalam perdagangan bilateral lebih merupakan suatu komoditas politik. Sebagai contoh Indonesia mengalami surplus dengan China, namun keragaman komoditas perdagangannya dianggap timpang¹². Mekanisme hubungan dan kerjasama di bidang politik terjalin dalam bentuk Konsultasi Bilateral Tingkat Pejabat Tinggi (SOM) sebagai hasil kesepakatan antar kedua Menteri Luar Negeri pada 1990 dan dilaksanakan secara reguler bergantian. Pada Pertemuan ke-5 di Jakarta Bulan April tahun 1999 disepakati pembentukan mekanisme: Dialog keamanan; Forum Konsultasi Kekonsuleran dan Keimigrasian; serta Pertukaran kunjungan antar pejabat Kemlu kedua negara guna menunjang peningkatan dan pengembangan hubungan bilateral. Terakhir, pada bulan April 2004, kedua Menlu melakukan pertemuan pertama Komisi Bersama di Beijing.

Pada kesempatan kunjungan Wakil Presiden RRC saat itu, Hu Jintao ke Indonesia pada 22-25 Juli 2000 telah ditandatangani *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*, masing-masing oleh Duta Besar RRC di Jakarta dan Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman RI. Pemerintah RRC senantiasa mendukung segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam membangun dan menjaga

¹² Kompas, 2 april 2002 , Menurut analisis ekonomi Hadi soesastro,

keutuhan dan integritas wilayah Republik Indonesia. Kunjungan yang dilakukan oleh PM RRC, Zhu Rongji ke Indonesia pada 7 – 11 November 2001 dan kunjungan Presiden Megawati ke Beijing pada Maret 2002 lebih mengokohkan lagi hubungan dan kerjasama Indonesia-China di semua sektor. Pada tahun 2001-2003 kontak-kontak antar pejabat tinggi terus berjalan dengan semakin intens dan produktif. Hubungan Indonesia-China juga terjalin pada tingkat regional seperti dialog ASEAN, ARF, ASEAN-CHINA *Joint Coordinating Committee* (JCC) mengenai kerjasama ekonomi dan perdagangan, KTT informal ASEAN + 1 (China) dan ASEAN + 3 (China, Jepang dan Korea Selatan). Hubungan baik RI-RRC juga terlihat dari saling memberikan dukungan dalam pencalonan untuk menduduki jabatan di Organisasi Internasional. Pemerintah Indonesia juga selalu berpegang teguh pada Kebijakan Satu China (*One China Policy*).

Selain dalam bidang sosial ekonomi, RI-RRC juga melakukan kerjasama dalam bidang pariwisata. Dengan dibantu oleh Perhimpunan Indonesia Tionghoa (Inti), Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan memfasilitasi pertemuan berbagai marga China yang ada di Indonesia, seperti berupaya menjadi tuan rumah konvensi dunia untuk marga Xi, marga Li, dan marga Huang yang bisa mendatangkan 800-1.800 anggota marga itu dari luar negeri. Pendekatan komunitas ini sangat efektif karena bukan hanya menjaring turis China dari negaranya, tetapi juga mereka sudah menyebar ke mancanegara. Bagi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, kunjungan

delegasi China ini merupakan gong untuk mengawali hubungan bilateral RI-China.

Peningkatan Hubungan Indonesia dengan China meningkat disaat kepemimpinan Gusdur. Dimana sejarah panjang Indonesia-China yang berliku dalam beberapa orde dan keberadaan etnis tersebut di tanah air sejak ratusan tahun lalu merupakan perekat kuat bagi hubungan budaya dan pariwisata dua negara sepanjang masa. "Namun di era baru potensi besar itu tidak digarap Indonesia akibat luka sejarah pada orde lama, sehingga hubungan Indonesia-China belum memberikan dampak lebih baik bagi perkembangan kebudayaan dan wisata. Kemudian mencair dengan kebijakan luar negeri Presiden Gus Dur yang membuka kran diplomatik lebih luas dan mesra dengan China. Yakni potensi bidang kebudayaan dan pariwisata kedua negara mulai memberikan dampak yang baik bagi Indonesia. "Dampak itu mulai terlihat dengan munculnya budaya-budaya etnis China yang sebelumnya 'terembargo' oleh situasi politik Indonesia, dan kemudian secara perlahan memperkuat keragaman budaya di Indonesia, seperti pagelaran barongsai dll. Membaiknya hubungan diplomatik Indonesia-China merupakan salah satu kebijakan populer Presiden Gus Dur yang telah memberikan dampak positif bagi bidang kebudayaan dan pariwisata.

B. Tujuan Penelitian

Secara garis besar ada dua tujuan yang ingin dicapai dengan penelitian ini, antara lain:

1. Mencari pemahaman yang lebih mendalam dan sistematis mengenai peningkatan dan penurunan hubungan bilateral antara pemerintahan Indonesia dengan RRC pada masa reformasi (1999-2002).
2. Sebagai prasyarat dalam meraih gelar sarjana strata satu dalam jurusan ilmu hubungan internasional (international program) fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: “Mengapa pemerintahan Indonesia pada masa reformasi melakukan peningkatan hubungan bilateral dengan RRC?”.

D. Landasan Pemikiran

Politik luar negeri secara umum dapat diartikan sebagai sekumpulan kebijakan yang mempengaruhi hubungan suatu pemerintahan dengan pemerintah negara-negara lain. Pengertian semacam ini bukan berarti membatasi aktor politik hanya Negara atau pemerintahan saja, namun dalam politik luar negeri, segala sesuatu yang berkaitan dengan itu merupakan

wewenang suatu pemerintahan Negara¹³. Erat ataupun renggangnya suatu hubungan luar negeri sangat dipengaruhi oleh situasi politik dalam negeri masing-masing negara yang terlibat. Hubungan Bilateral akan lebih kuat apabila didasari dengan kerjasama yang benar dan saling menguntungkan, sehingga keselarasan dan keseimbangan dalam hubungan akan selalu ada dan terjaga. Hubungan bilateral seperti RI-RRC juga merupakan kerjasama yang saling menguntungkan karena kerjasama ini diperlukan atau dibutuhkan oleh kedua negara. Dimana kedua Negara ini terpenuhi kebutuhannya atas kerjasama ini, sehingga kedua Negara ini akan selalu membutuhkan untuk mencukupi kekurangannya.

Menurut Richard C. Snyder¹⁴, politik internasional didefinisikan sebagai proses interaksi suatu Negara pada level pemerintahan. Politik luar negeri pada dasarnya merupakan perilaku Negara dalam hubungan internasional sebagai respon atas perubahan dilingkungan domestik maupun internasional. Politik ini merupakan bagian dari politik dalam negeri yang dikhususkan untuk ditujukan lingkungan Internasional. Oleh karena itu, politik luar negeri dapat dimaknai sebagai rangkaian kebijakan yang otoritatif dari suatu Negara terhadap dunia luar, yang dipengaruhi dan dibentuk oleh berbagai faktor internal dan external yang saling berkaitan.

¹³ T.B millar, "on writing about foreign policy" dalam James N Rosenau, *International Politics and Foreign Policy*, Free Press, 1969, hal. 57.

¹⁴ Richard C. Snyder, "the decision making approach of the study of international politics", dalam James N. Rosenau, *International Politics and Foreign Policy: a reader in research and theory*, The Free Press, New York, 1969.

Politik luar negeri sangat erat kaitannya dengan konsep kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan dasar utama suatu Negara melaksanakan politik luar negeri hamper semua ilmuwan hubungan internasional membenarkan hal tersebut. Namun, mengenai konsep kepentingan nasional itu sendiri, belum ada kata sepakat diantara para ilmuwan hubungan internasional itu sendiri. Menurut Morgenthau¹⁵, arti minimum yang inheren didalam konsep kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup yang dimaksud adalah kemampuan minimum Negara-negara untuk melindungi identitas fisik, politik dan kulturalnya dari gangguan Negara bangsa lain, misalnya, mempertahankan integritas territorial, mempertahankan rejim ekonomi-politiknya, memelihara norma-norma etis, religious dan lain-lain. Dengan dasar inilah para pemimpin egara membuat kebijakan-kebijakan tertentu terhadap Negara lain.

Konsep semacam itu memiliki pengertian yang sangat umum dan sulit dipahami. Morgethau mencoba mengemukakan bagaimana mengidentifikasi kepentingan nasional dengan kepentingan lain-lainnya. Kepentingan nasional adalah hasil kompromidari kepentingan-kepentingan politik yang saling bertentangan. Ini bukan suatu ideal yang dicapai secara abstrak dan saintifik, tetapi merupakan hasil dari persaingan politik internal yang berlangsung terus menerus. Dalam hal ini, pemerintahlah yang harus

¹⁵ Morgenthau dalam tulisan T.A Couloumbis dan J.H. Wolfe, *introduction to International Relations*, pretice-hall, 1986.

bertanggungjawab mengidentifikasi dan membuat kebijakan-kebijakan untuk mencapai kepentingan nasional.

Menurut James N. Rosenau, ada dua pandangan analisis politik luar negeri yang menggunakan konsep kepentingan nasional. Pertama, pandangan Objektif yang melihat kepentingan nasional sebagai sesuatu yang biasa didefinisikan secara jelas dengan menggunakan kriteria objektif sehingga rumusan kepentingan nasional suatu Negara akan cenderung konstan dari satu waktu ke waktu¹⁶. Kriteria objektif dan konstan yang secara garis besar akan mempengaruhi perilaku suatu Negara dalam berinteraksi dengan dunia luar, antara lain seperti kekuatan , militer, ukuran Negara, yang biasanya kita kenal dengan *National Power Capability* ini yang sangat menentukan tingkatan independensi suatu Negara dalam hubungan Internasional. Dengan demikian, analisis yang menggunakan pandangan objektif ini, bisa menggunakan konsep kepentingan nasional sebagai pengukur sesuai atau tidaknya, benar atau tidak benarnya suatu politik yang dijalankan. Dinamika eksternal yang merupakan hasil dari negara-negara, secara langsung maupun tidak langsung juga akan mempengaruhi keputusan politik luar negeri suatu Negara. Namun, pandangan objektif dan dinamika eksternal diatas tidak mampu menjelaskan mengapa pada suatu Negara yang sama dapat menjalankan politik luar negerinya bisa bertolak belakang dari satu masa ke masa lainnya

¹⁶ Seorang ahli yang berusaha menjadikan studi tentang politik luar negeri lebih 'scientific', melalui bukunya *The Scientific Study of foreign Policy*, New York : The Free Press, 1971

Hal tersebut dapat dijawab oleh pandangan yang kedua, yaitu pandangan subjektif yang melihat kepentingan nasional sebagai sesuatu yang selalu berubah-ubah mengikuti preferensi subjektif dari para pembuat keputusan. Konsep kepentingan nasional ini dipergunakan para analis sebagai alat untuk menjelaskan, mengapa para pembuat keputusan politik luar negeri itu memutuskan apa yang telah mereka putuskan. Jadi, dalam memahami politik luar negeri kita harus memahami kepentingan nasional yang mana hal itu selalu berubah-ubah mengikuti preferensi para pembuat kebijakan. Walaupun kedua pandangan ini memiliki kelemahan masing-masing. Pengertian kepentingan baik secara objektif maupun subjektif akan dapat membantu kita memahami sasaran, dinamika dan arah suatu politik luar negeri, baik pada tataran aspirasional, operasional, penjabar maupun polemik disepertinya.

Hal yang cukup penting dalam pembahasan konsep kepentingan nasional adalah bahwa kepentingan nasional itu didefinisikan oleh proses politik dan kepentingan nasional suatu bangsa pada suatu waktu dan ditentukan oleh pemegang kekuasaan pada waktu itu. Oleh karena itu, kajian politik luar negeri dengan pendekatan kepentingan nasional akhirnya banyak tertuju pada proses pembuat kebijakan, antara lain dengan menyoroti system pemerintahan, perilaku birokrasi dan pandangan para elit politik. Dengan kata

lain politik luar negeri harus dimulai dengan memahami dinamika politik dalam negeri suatu Negara¹⁷.

Proses pembuatan kebijakan luar negeri sebagaimana telah diungkapkan diatas, menurut Richard C. Snyder, dipengaruhi oleh dua setting, internal dan eksternal¹⁸. Setting didefinisikan sebagai seperangkat kategori yang relevan dengan kondisi-kondisi dan faktor-faktor yang potensial yang mempunyai pengaruh terhadap tindakan suatu negara. 'Setting eksternal' pada umumnya mencakup faktor dan kondisi atas wilayah teritorial suatu negara baik aksi maupun reaksi dari negara lain dan masyarakat dimana mereka bertindak dalam lingkungan internasional. Dari sudut ini yang patut dipertimbangkan adalah posisi geopolitik suatu dalam sistem global serta hubungannya dengan semua negara yang memiliki relevansi. "Setting Internal" meliputi seluruh struktur sistem politik domestik.

Dari beberapa konsep diatas, dapat diterapkan beberapa teori yang menyangkut hubungan kerjasama Indonesia dengan China. Konsep kebijakan politik luar negeri memberi pandangan yang luas bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh Indonesia mempengaruhi kebijakan China dalam mengambil keputusan kerjasama luar negerinya. Hal ini disebabkan karena faktor kerjasama yang digunakan oleh kedua belah pihak ialah kerjasama yang mutualisme sehingga keputusan dari kedua Negara tersebut tidak merugikan

¹⁷ Dewi Fortuna Anwar, *Strategi Kebijakan Luar Negeri Dalam Menghadapi Perkembangan Dinamika Global dan Internal*, www.habibie.net

¹⁸ Richard C.Snyder, " *The Decision Making Approach To The Study of International Politics*", dalam James N. Rosenau, *International Politics and Foreign Policy : a reder in Research and Theory*, The Free Press, New York, 1969.

salah satu pihak. Dari beberapa konsep tersebut juga kita juga dapat menyimpulkan hubungan yang dijalankan oleh Indonesia dengan China sesuai dengan politik yang dijalankan atau tidak. Jadi setiap keputusan yang diambil oleh kedua Negara khususnya dalam hubungan ini, bias dianalisis oleh beberapa konsep diatas. Sehingga hubungan kedua Negara bisa terjaga dan seimbang dengan adanya kebijakan yang sehat dan saling menguntungkan.

E. Hipotesa

Dari kerangka teori yang digunakan maka dapat ditarik suatu hipotesa sebagai berikut:

1. Pada masa reformasi Indonesia tahun 1999-2002 RRC merupakan Negara dengan perekonomian yang besar dan kuat. Sehingga diharapkan menjadi suatu hubungan bilateral yang mutualisme.
2. Indonesia dapat memetik banyak pelajaran berharga dari RRC, terutama bagaimana negara tersebut seakan kebal menghadapi badai internasional.

Politik luar negeri dapat dimaknai sebagai rangkaian kebijakan yang otoritatif dari suatu Negara terhadap dunia luar, yang dipengaruhi dan dibentuk oleh berbagai factor internal dan external yang saling berinteraksi. ada dua pandangan analisis politik luar negeri yang menggunakan konsep kepentingan nasional. Pertama, pandangan Objektif yang melihat kepentingan nasional sebagai sesuatu yang biasa didefinisikan secara jelas dengan mengguakan kriteria objektif sehingga rumusan kepentingan nasional suatu

Negara akan cenderung konstan dari satu waktu ke waktu. kedua, yaitu pandangan subjektif yang melihat kepentingan nasional sebagai sesuatu yang selalu berubah-ubah mengikuti preferensi subjektif dari para pembuat keputusan. Kebijakan pemerintahan dan asas/ideologi kedua Negara yang berbeda, keadaan pemerintahan pada masa itu dan perbedaan pemikiran dari pemegang kekuasaan pada masa reformasi membuat pengaruh kebijakan pemerintah sehingga mengakibatkan pasang surut hubungan bilateral antara Indonesia dengan RRC.

F. Jangkauan Penelitian

Agar dalam pembahasan permasalahan tidak terlalu meluas, maka penulis mencoba membatasi permasalahan yang terjadi hanya pada masa reformasi tahun 1999 - 2002 meskipun tidak menutup kemungkinan dibahasnya persoalan diluar hubungan bilateral kedua Negara ini tetapi terkait dengan pokok permasalahan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana kajian yang sering ditemui dalam ilmu sosial, dalam mencari data-data yang diperlukan untuk menunjang penulis menggunakan studi kepustakaan, baik itu dari buku-buku yang ada di perpustakaan, ensiklopedi (Microsoft Encarta) jurnal, majalah dan koran serta data dari internet. Data yang diperoleh nantinya akan dianalisa dengan landasan berfikir

yang teoritis. Meskipun hanya berupa data sekunder, penulis yakin bahwa penelitian ini tidak mengurangi kebenaran ilmiahnya.

H. Sistematika Penulisan

Tulisan ini secara keseluruhan disusun berdasarkan bab per bab. Setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Hal ini dimaksudkan untuk membedakan jenis masalah dalam pembagian bab-babnya. Sedangkan dalam sub-babnya dimaksudkan untuk menguraikan isi dari tiap-tiap bab secara terperinci, sehingga akan diperoleh suatu pemahaman secara menyeluruh.